



## Bab 6

# Penutup

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Jangan Seperti Menggantang Anak Ayam



**Kita jangan sampai kehilangan momentum karena ingin memaksakan sesuatu. Nanti hasilnya ke sini tak tampak, ke situ tak sampai. Ada yang patut tapi tak mungkin, ada yang mungkin tapi tak patut.**

\*\*\*

**PENGAMAT** ekonomi Unri Edyanus Herman Halim menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2005 masih dapat diterima. Meskipun realisasi program kegiatan di beberapa satuan kerja (satker) di lapangan terlihat belum berjalan maksimal. Bahkan ada yang belum terlaksana, seperti kebun sawit K2I oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau.

Adanya beberapa satker yang belum selesai



menjalankan program, lantaran diantara programnya belum betul-betul bersentuhan dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam membuat program, satker juga tak memilah mana program prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sistem dan prinsip yang dipakai tampaknya masih pada fungsi mengikuti uang, seharusnya *money follow function* (uang mengikuti fungsi). Artinya, para satker harus dapat menggunakan anggaran secara optimal kepada kegiatan-kegiatan prioritas.

Pada laporan LKPJ Gubri tahun 2005 beberapa waktu lalu, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 831 Miliar lebih dari total APBD Riau tahun 2005 Rp 2,8 Triliun. Sisa ini dinilai pria yang karib disapa Edyanus, secara tidak langsung menghilangkan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya.

Walau demikian, sisa APBD Riau 2005 itu mesti dilihat dari beberapa sebab. *Pertama*, akibat kurang baiknya perencanaan. Seperti kebun sawit K2I. Dana yang sudah dianggarkan dan dinanti-nanti masyarakat, akhirnya tidak terpakai. *Kedua*, akibat kurang profesionalnya aparatur birokrasi. *Ketiga*, akibat perubahan sistem penganggaran. Saat ini penganggaran nasional yang dipakai adalah anggaran berbasis kinerja. Untuk melaksanakannya diperlukan keterampilan, kompetensi dan kemampuan.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Keempat, karena negeri ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Akibatnya, banyak aparat pemerintah kita yang takut untuk menjadi pemimpin kegiatan (pemki). Mereka takut salah administrasi, salah prosedur dan lain-lain. Ketakutan ini menyebabkan jalannya program jadi melambat.

Kelima, kelebihan sisa anggaran bisa saja diakibatkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari pembiayaan dan pengeluaran. Mungkin DBH naik dan penerimaan pajak dari non pajak juga semakin tinggi.

Jadi, sisa anggaran yang besar itu mesti diketahui dari mana sumbernya. Kalau sisa anggaran banyak bersisa dari kesalahan dan kurang profesionalnya aparat birokrasi kita, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Namun kalau semuanya bersumber dari naiknya pendapatan atau bersumber karena prinsip kehati-hatian sesuai dengan sistem keuangan negara yang baru, maka kita tinggal merencanakan untuk tahun depan. Arahkan ke program yang lebih prioritas," kata Edyanus.

Menurut Edyanus, langkah yang mesti diambil adalah dengan cara menyusun program yang betul-betul terkait dengan pengentasan kemiskinan. Penetapan program secara bersama-sama lalu dikerjakan sesuai anggaran dan tepat waktu merupakan langkah utama yang harus dilaksanakan. Jangan



hanya seperti menggantang anak ayam, satu masuk, yang satu keluar. Dan untuk menetapkan itu, landasi dengan kajian-kajian yang tidak hanya dilakukan lewat pendekatan politis saja, tetapi pendekatan teknokratik dan pendekatan atas bawah dan bawah atas. Kaji dengan keilmuan dan dekati secara politis.

Penilaian Edyanus, tersisnya anggaran APBD Riau tahun 2005 yang hampir 1 triliun bukan sepenuhnya disebabkan oleh satker sebagai pelaksana kegiatan tidak menjalankan seluruh programnya dengan baik. Program otonomi desa dan pemberian bantuan ekonomi masyarakat desa sudah berjalan. Kita mesti melihat secara komprehensif karena tidak gampang menjalankan sebuah program. Perlu perencanaan yang matang.

Kalau memang ada yang belum jalan dan itu memang tidak bisa kita jalankan, pemprov harus legowo mengganti program kepada program yang lebih optimal dan lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Riau. "Kita jangan sampai kehilangan momentum karena ingin memaksakan sesuatu. Nanti hasilnya ke sini tak tampak, ke situ tak sampai. Ada yang patut tapi tak mungkin, ada yang mungkin tapi tak patut," kata Edyanus. (sir/bis)

